



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 195 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS TAHUN 2025

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, terdapat kebutuhan untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah pemrakarsa yang merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga perlu menetapkan rancangan Peraturan Bupati dimaksud dalam Keputusan Bupati tentang program pembentukan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Banyumas Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Banyumas Tahun 2025 dengan daftar rancangan peraturan bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 APR 2025

BUPATI BANYUMAS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 195 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TAHUN 2025

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN BUPATI DALAM
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TAHUN 2025

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PENGUSUL /PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)
1	Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi	Badan Pendapatan Daerah
2	Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pendapatan Daerah
3	Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah
4	Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu	Badan Pendapatan Daerah
5	Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame	Badan Pendapatan Daerah
6	Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah	Badan Pendapatan Daerah
7	Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah
8	Klasifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pendapatan Daerah
9	Nilai Sewa Reklame	Badan Pendapatan Daerah
10	Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah	Badan Pendapatan Daerah
11	Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal	Badan Pendapatan Daerah
12	Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
13	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
14	Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Terhutang Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2024	Badan Pendapatan Daerah

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PENGUSUL /PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)
15	Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Badan Pendapatan Daerah
16	Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
17	Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Banyumas Tahun 2024	Badan Pendapatan Daerah
18	Tata Cara Perhitungan Besaran Tarif Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan Daerah
19	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
20	Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga	Badan Keuangan dan Aset Daerah
21	Perubahan Kedua atas Peraturan bupati Nomor 24 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas	Badan Keuangan dan Aset Daerah
22	Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Anggaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah
23	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas	Badan Keuangan dan Aset Daerah
24	Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah
25	Penjabaran Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Keuangan dan Aset Daerah
26	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah
27	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Keuangan dan Aset Daerah
28	Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
29	Analisis Standar Biaya Tahun Anggaran 2026	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PENGUSUL /PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)
30	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap	Badan Keuangan dan Aset Daerah
31	Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
32	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah
33	Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah
34	Sistem Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
35	Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
36	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
37	Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Pada Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
38	Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang bentuk Baku Singkatan/Akronim Nomenklatur serta Bentuk Stempel Jabatan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
39	Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
40	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
41	Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
42	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
43	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
44	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
45	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PENGUSUL /PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)
46	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
47	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
48	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
49	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
50	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
51	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
52	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
53	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
54	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Arcawinangun Wetan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
55	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
56	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
57	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
58	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
59	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PENGUSUL /PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)
60	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
61	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
62	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
63	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
64	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
65	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
66	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
67	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
68	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
69	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kober Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
70	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
71	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
72	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
73	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PENGUSUL /PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)
74	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
75	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
76	Penugasan Kepada Desa untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
77	Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
78	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
79	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
80	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
81	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana dan Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
82	Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
83	Jadwal Retensi Arsip	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
84	Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
85	Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer	Dinas Kesehatan
86	Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas	Dinas Kesehatan
87	Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah pada Sektor Kesehatan	Dinas Kesehatan
88	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
89	Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah	Dinas Pendidikan

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PENGUSUL /PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)
	Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas	
90	Penyelenggaraan Perparkiran	Dinas Perhubungan
91	Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Lokawisata Baturraden	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
92	Tata Cara Kerja sama pada Badan Layanan Umum Daerah Lokawisata Baturraden	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
93	Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
94	Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Daerah Aliran Sungai Sumangkir Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
95	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
96	Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2026	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
97	Disiplin Aparatur Pemerintah Desa	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
98	Pembentukan Desa Persiapan Watuagung Kulon Kecamatan Tambak	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
99	Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100	Pengelolaan Aset Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
101	Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
102	Tata Naskah Dinas untuk Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
103	Tata Cara Penyelesaian Pelepasan Tanah Banda Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja	Pj. Bupati Banyumas

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	PENGUSUL /PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)
104	Keringanan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

BUPATI BANYUMAS,

